

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Periode: Juli – September 2025



**DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja selama masa Triwulan III Tahun 2025 atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Laporan Kinerja ini menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Triwulan III tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan III tahun 2025 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Oktober 2025

Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Jaminan Produk Halal



E. A. Chuzaemi Abidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1. Maksud	5
2. Tujuan	5
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	9
B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT).....	10
C. PERJANJIAN KINERJA (PK)	12
D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA DEPUTI.....	23
B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN	56
C. HIGHLIGHT KINERJA	57
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan salah satu unit organisasi Eselon I di BPJPH yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi.

Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* untuk perbaikan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025-2029 yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam mendukung pencapaian visi BPJPH, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal; dan 2) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal. Sasaran program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH; dan 2) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal. Sasaran kegiatan meningkatnya pembinaan lembaga JPH dan SDM Halal menjadi tanggung jawab bagi unit kerja Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal menjadi tanggung jawab bagi unit kerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja pertama yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti memiliki capaian kinerja sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan SANGAT BAIK. Indikator kinerja kedua yaitu persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH memiliki capaian kinerja sebesar 10,16%. Sasaran program meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja pertama yaitu persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya belum memiliki capaian kinerja karena belum terdapat realisasi. Indikator kinerja kedua yaitu persentase SDM Halal yang berkompeten memiliki capaian kinerja sebesar 45,32%. Indikator kinerja ketiga yaitu persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal memiliki capaian kinerja sebesar 65%.

Sasaran kegiatan dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja berupa persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 66,50%. Indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 39,45%. Indikator kinerja berupa persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya memperoleh capaian kinerja sebesar 45,50%.

Sasaran kegiatan dari Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 72,50%. Indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 88,67%. Indikator kinerja berupa persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar memperoleh capaian kinerja sebesar 13%. Indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH memperoleh capaian kinerja sebesar 71,10%. Indikator kinerja berupa persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 76,11%. Beberapa indikator kinerja belum memiliki realisasi karena Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan unit kerja baru di bawah BPJPH sebagai LPNK yang masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.

jaminan produk halal . BPJPH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. BPJPH terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal maka dibuatlah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di BPJPH.

Struktur organisasi dari Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal yang masing-masing memiliki subdirektorat di bawahnya. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina JPH yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH. Sedangkan, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang pengawasan JPH yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal membawahi dua direktorat utama:

1. Direktorat Pembinaan JPH

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jaminan produk halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jaminan produk halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jaminan produk halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

2. Direktorat Pengawasan JPH

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Fungsi Pendukung

- a. Tata Usaha Deputi: Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan anggaran)
- b. Tim Teknis dan Kelompok Kerja: Mendukung pelaksanaan program strategis, evaluasi, dan pelaporan.

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki adalah sebanyak 43 Pegawai terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

5. Anggaran

Anggaran bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-142.01.1.693733/2025 yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2025 sebesar Rp.20.015.965.000,- (Dua puluh miliar lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah.)

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan pada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan struktur organisasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Tujuan dan Sasaran Program, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, pengukuran kinerja dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja, kendala, serta rencana dan tindak lanjut.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Sekretariat Utama. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan Visi BPJPH, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH mendukung misi pertama BPJPH yaitu: **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan**

Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan” Untuk mewujudkan misi tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal”. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh “tingkat literasi produk dan jasa halal”.

BPJPH telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai BPJPH pada tahun 2029 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

- **Tujuan 1:** Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar
- **Tujuan 2:** Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dengan sasaran strategis meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk
- **Tujuan 3:** Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan sasaran strategis meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.
- **Tujuan 4:** Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan keempat sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH berperan dalam mencapai tujuan 2, yaitu peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Adapun indikator maupun ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai, yaitu:

- 1) Tingkat literasi produk dan jasa halal; dan
- 2) Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Adapun RKT Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL**

NO.	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%
			b Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal	a Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%
			b Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%
			c Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%
2	Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
			b Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang	100%

NO.	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	
			c Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%
			d Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%
			e Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%
3	Direktorat Bina Jaminan Produk Halal	Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH	a Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
			b Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
			c Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPJPH tahun 2025-2029 dan DIPA BPJPH Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar 10.922.419.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu), Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis

yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan unit kerja dibawahnya, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JPH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%
		b	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal	a	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%
		b	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%
		c	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 2 (dua) sasaran program dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT BINA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH	a	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
		b	Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
		c	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Bina Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
		b	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
		c	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%
		d	Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%
		e	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi beserta anggarannya. Adapun RAPK yang ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai berikut:

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JPH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Penyusunan rekomendasi hasil penginspeksi JPH yang diterbitkan													100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal										A. Pengembangan E-Learning Peserta										184.753.000
				B. Pembinaan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)										C. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH (PKN/P3N/LPH)										141.352.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	052. Penilaian Kompetensi dan Kualifikasi Lembaga Peserta Jaminan Produk Halal										D. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										108.047.000
				E. Sosialisasi Peserta Jaminan Produk Halal										F. Sosialisasi Peserta Jaminan Produk Halal										827.886.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	053. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - B11										G. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										1.051.553.000
				H. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										I. Pembinaan LPH melalui Publikasi Media HMI										1.000.000.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	054. Penilaian Kompetensi dan Kualifikasi Lembaga Peserta Jaminan Produk Halal										J. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										225.273.000
				K. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										L. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										357.176.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	055. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - B12										M. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										119.754.000
				N. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										O. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										51.951.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	056. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - B13										P. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										95.960.000
				Q. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										R. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										103.944.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	057. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - B14										S. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										543.680.000
				T. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										U. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										648.482.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	058. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - B15										V. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										273.052.000
				W. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										X. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	KOMPONEN										SUB KOMPONEN										5.639.627.000
				051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal										D. Fasilitas Business Matching Bersama Pengusaha Kecil (Madrasah, PKM, Kantor Kementerian Agama, KMA), LPH, dan Jagat Layanan Halal										439.612.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	052. Penilaian Kompetensi dan Kualifikasi Lembaga Peserta Jaminan Produk Halal										E. Evaluasi Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Rantai Berasama TJEN, Djejen Persepsi, dan Saluran LPH										190.845.000
				F. Business Matching bagi Pelaku Usaha oleh Saluran LPH dan Pemerintah Daerah										F. Business Matching bagi Pelaku Usaha oleh Saluran LPH dan Pemerintah Daerah										793.785.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	053. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - B11										G. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										42.470.000
				H. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										H. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH										363.219.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	054. Penilaian Kompetensi dan Kualifikasi Lembaga Peserta Jaminan Produk Halal										A. Rapat LPH dan P3N oleh Saluran Halal										2.511.171.000
				B. Pembinaan LPH bagi Pelaku Usaha Sektor										B. Pembinaan LPH bagi Pelaku Usaha Sektor										487.516.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	055. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - B12										C. Business Matching bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar										217.440.000
				D. Business Matching bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar										E. Pembinaan Pelaku Usaha										239.770.000
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	056. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - B13										B. Evaluasi Hasil (Halal Goes to Campus)										342.849.000
				051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal																				
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.02H.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	KOMPONEN										SUB KOMPONEN										5.067.536.000
				051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal										A. Literasi Salar Halal bagi Kelompok Pengusaha Jaminan										5.067.536.000
				TOTAL										TOTAL										24.523.129.000



4 Februari 2025
Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

Druzenni Abidin

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET										ANGGARAN			
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12	
		a. Persentase lembaga yang meningkatkan pemenuhannya setelah dilakukan pembinaan			7.70%						47.60%		66.50%		70%	5.353.822.000
			KOMPONEN										SUB KOMPONEN			
			BINCANGAN OUTPUT										SUB KOMPONEN			
			NO										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			
			7161.0208.001. lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal										SUB KOMPONEN			
			1										SUB KOMPONEN			

		2.	7161 QDCC 001 SDM yang mendapatkan pembinaan jaminan Produk Halal	051. Sumber Daya Manusia yang terbiasa	B. Edukasi Halal (Halal Goes to Campus)												342.849.000
					TARGET												
					801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	
			c. Persentase Pelaku Usaha yang meningkat penanamannya setelah dilakukan pembinaan				21,00%			21,00%			45,50%			70%	5.087.536.000
					KOMPONEN							SUB KOMPONEN					
		NO	RINCIAN OUTPUT														
1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH	1.	7161 QDCC 001 SDM yang mendapatkan pembinaan jaminan Produk Halal	051. Sumber Daya Manusia yang terbiasa	A. Literasi Sadar Halal Bagi Kelompok Masyarakat												5.087.536.000
				TOTAL												16.039.985.000	

Jakarta, 5 Februari 2025
Direktur Bina Jaminan Produk Halal,



mad Firdi Wadidi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NO	SASARAN KEGATAN	INDIKATOR UJI/REK. PROGRAM	TARGET												ANGGARAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Meningkatnya kualitas hasil pengemasan lembaga JPH dan SDM Halal	a. Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang diadopsi dan diterbitkan rekomendasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA DEPUTI

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$
Baik	$=100\%$
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$
Kurang	$<70\%$

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran program antara lain sebagai berikut:

1. **Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pengawasan Jaminan Produk Halal**
 - a. **Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan III (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------------	------------------------	----------------------

Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%	104 tindak lanjut rekomendasi	104 tindak lanjut rekomendasi	100%
---	---	--	------	-------------------------------	-------------------------------	------

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH adalah tindak lanjut dari hasil pengawasan berupa saran, instruksi, atau arahan tertulis yang dikeluarkan oleh BPJPH kepada pihak yang diawasi berdasarkan temuan hasil pengawasan. Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti adalah jumlah dari total rekomendasi hasil pengawasan JPH yang telah mendapatkan tindak lanjut. Semakin tinggi rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti maka semakin tinggi efektivitas pengawasan Jaminan Produk Halal yang berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap produk halal yang beredar di Indonesia. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 100% atau sebanyak 104 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan sudah di realisasikan sebesar 104 rekomendasi yang ditindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan dari kegiatan pengawasan dengan capaian sebesar 100%. Pengukuran terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi berasal dari kegiatan pengawasan pelaku usaha dan produk, serta pengawasan LPH.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan JPH telah ditetapkan target sebesar 100% pada akhir tahun 2025. Target untuk Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 104 tindaklanjuti rekomendasi atau sebesar 100%. Realisasi Triwulan III Tahun 2025 sebesar 104 tindaklanjuti rekomendasi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase rekomendasi hasil pengawasan	Target	0	100%	100%
	Capaian	0	100%	100%

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
JPH yang ditindaklanjuti				

Capaian pada triwulan III telah melampaui target yang ditetapkan, serta capaiannya sama dengan triwulan II.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase rekomendasi hasil Pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) pengawasan pelaku usaha dan produk; dan
- b) pengawasan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum adanya daftar lembaga dan SDM halal yang telah dilakukan pengawasan, sehingga mengalami kesulitan untuk menentukan target Lembaga dan SDM yang dilakukan pengawasan; dan
- ii. belum adanya fasilitas yang digunakan untuk SDM atau lembaga melaporkan hasil tindak lanjut pengawasan yang direkomendasikan oleh pengawas JPH.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. melakukan sinkronisasi data SIHALAL untuk menyusun masterlist profiling Lembaga dan SDM Halal, sehingga penentuan target pengawasan tahunan dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko; dan

- ii. membangun fitur modul "Monitoring Tindak Lanjut" pada sistem informasi pengawasan sebagai fasilitas bagi lembaga atau SDM untuk mengunggah bukti perbaikan atas rekomendasi pengawas secara daring dan terintegrasi membuat panduan langkah-demi-langkah bagi pelaku usaha tentang cara melakukan perbaikan atas temuan yang paling sering muncul.

b. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga Terhadap Penyelenggaraan JPH

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	b Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%	1120 Pelaku Usaha/ Lembaga	189 Pelaku Usaha/ Lembaga	10,16%

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga Terhadap Penyelenggaraan JPH

Kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH adalah suatu kondisi di mana pelaku usaha dan lembaga JPH (LPH dan LP3H) yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Persentase kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga terhadap Penyelenggaraan JPH adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketaatan pelaku usaha dan lembaga dalam memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Kepatuhan dinilai berdasarkan hasil kegiatan pengawasan JPH. Semakin tinggi persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga, maka semakin efektif pengawasan JPH. Hal ini dapat mengurangi potensi pelanggaran dan risiko ketidaksesuaian terhadap standar halal dan menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap produk halal di Indonesia. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60%. Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH telah mencapai 189 pelaku usaha/lembaga dengan capaian kinerja sebesar 10,16%. Pengukuran

dilakukan terhadap 189 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang telah diawasi oleh tim pengawas LP3H di Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 1120 Pelaku Usaha/Lembaga pada akhir tahun 2025. Realisasi triwulan III tahun 2025 telah tercapai sebanyak 189 Pendamping Proses Produk Halal dengan capaian kinerja sebesar 10,16%, namun belum memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 45% berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	Target	0	30%	45%
	Capaian	0	27,96%	10,16%

Pada Triwulan III tahun 2025, indikator belum memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan III. Capaian triwulan III kurang dari yang target dan capaian triwulan II.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya target pada Triwulan III adalah melaksanakan pengawasan terhadap 189 pendamping proses produk halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum terintegrasinya secara sempurna data aktivitas pendampingan di lapangan dengan sistem penilaian kepatuhan, sehingga sulit mengukur apakah P3H benar-benar melakukan verifikasi fisik atau hanya sekadar administratif;
- ii. sulit untuk memverifikasi keaslian dokumen pendukung (seperti foto kunjungan atau pernyataan pelaku usaha) yang diunggah oleh P3H, yang berpotensi menyebabkan bias dalam hasil penghitungan kepatuhan; dan
- iii. belum tersedianya instrumen penilaian standar dan sistem validasi data otomatis yang mengakibatkan penghitungan kepatuhan P3H masih bersifat manual serta kurang akurat dalam memotret kualitas pendampingan di lapangan.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. menyusun instrumen penilaian kepatuhan P3H yang mencakup aspek kedisiplinan waktu, akurasi dokumen, dan pemenuhan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai dasar penghitungan yang objektif;
- ii. membangun sistem pemantauan real-time yang secara otomatis menghitung skor kepatuhan P3H berdasarkan performa harian untuk memudahkan penentuan target pembinaan bagi P3H dengan nilai kepatuhan rendah; dan
- iii. melakukan digitalisasi instrumen penilaian kepatuhan melalui pengembangan dasbor monitoring yang mengintegrasikan data aktivitas lapangan P3H dengan parameter kualitas SJPH secara *real-time*.

2. **Sasaran Program Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal**

a. **Persentase Lembaga JPH yang Meningkatkan Kinerjanya**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap	a Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%	120 Lembaga	-	-

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Jaminan Produk Halal					

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga JPH yang Meningkatkan Kerjanya

Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari LPH, LP3H, dan LPP JPH. Jumlah lembaga penyelenggara JPH yang menunjukkan peningkatan kinerja dinilai berdasarkan skor peningkatan kinerja lembaga dalam kurun waktu satu tahun. Semakin tinggi tingkat literasi halal, semakin baik pula pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal serta semakin besar keterlibatan mereka dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60% atau sebanyak 120 lembaga. Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya belum terdapat realisasi, sehingga capaian indikator kinerja masih belum dapat dilakukan perhitungan. Pelaksanaan indikator pada Triwulan III tahun 2025 masih berada dalam tahap penentuan indikator capaian kinerja untuk mengukur peningkatan kinerja lembaga JPH, namun belum dilaksanakan pengukuran terkait peningkatan kerjanya. Indikator capaian kinerja untuk menilai peningkatan kinerja lembaga JPH antara lain sebagai berikut:

- a) Lembaga Pemeriksa Halal yang meningkat kerjanya diukur berdasarkan peningkatan capaian sertifikasi halal, penurunan waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, dan peningkatan ruang lingkup akreditasi.
- b) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang meningkat kerjanya diukur berdasarkan peningkatan capaian sertifikasi halal.
- c) Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH yang meningkat kerjanya diukur berdasarkan pada Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH yang sudah memenuhi hasil penilaian registrasi dan kesesuaian, terbit nomor registrasi di BPJPH, dan melaksanakan pelatihan JPH pada tahun 2025.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 120 lembaga pada akhir tahun 2025, namun pada

triwulan III belum terdapat realisasi yang memenuhi target sebesar 45% berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	Target	0	30%	45%
	Capaian	0	0	0

Pada Triwulan III tahun 2025, belum terdapat capaian yang mencapai target sebesar 45%. Perbandingan triwulan III dengan triwulan I dan triwulan II tidak dapat ditentukan karena belum terdapat realisasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) rapat koordinasi pembinaan LPH Pratama: peningkatan ruang lingkup dan kompetensi LPH;
- b) visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH; dan
- c) pembinaan LP3H, registrasi LP3H, dan registrasi P3H.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum tersusunnya program kerja dan instrumen Evaluasi Peningkatan Kinerja bagi Lembaga JPH terbina; dan
- ii. perumusan kebijakan belum komprehensif sehingga berdampak pada pengukuran indikator kinerja yang belum terlaksana.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. melakukan rapat pembahasan terkait program kerja dan evaluasi yang akan dijalankan dalam pengukuran indikator kinerja; dan
- ii. melaksanakan rapat koordinasi dengan internal pimpinan dan tim pembinaan terkait arah kebijakan yang selaras dengan indikator kinerja.

b. Persentase SDM Halal yang Berkompeten

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	b	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%	139 SDM Halal	-	-

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Berkompeten

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran dalam penyelenggaraan JPH, yang terdiri dari auditor halal, pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal dan penyelia halal. Sumber Daya Manusia (SDM) halal yang telah dinyatakan kompeten dapat dilihat melalui instrumen penilaian monitoring kompetensi terhadap SDM Halal yang sesuai bidangnya. Semakin tinggi persentase SDM Halal yang berkompeten maka mencerminkan penyelenggaraan JPH dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai standar nasional/internasional. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60% atau sebanyak 139 SDM Halal. Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator kinerja Persentase SDM Halal yang berkompeten tidak terdapat realisasi karena belum terdapat instrumen penilaian monitoring kompetensi terhadap SDM Halal yang sesuai bidangnya.

2) Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 139 SDM Halal pada akhir tahun 2025. Pada triwulan II, belum diperoleh realisasi karena belum terdapat kegiatan yang menunjang indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
	Target	0	30%	45%

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	Capaian	0	45,32%	0

Pada Triwulan III tahun 2025, tidak terdapat realisasi pada indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya. Capaian di triwulan III mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan II yaitu sebesar 45,32%.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja tidak dilaksanakan pada triwulan III.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum terdapat pembahasan program terkait pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten; dan
- ii. belum terdapat kesamaan persepsi di internal lembaga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. melakukan rapat pembahasan terkait program yang akan dijalankan; dan
- ii. rapat koordinasi dengan internal pimpinan dan tim pembinaan.

c. Persentase Daerah yang Terlibat Gerakan Sadar Halal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
------------------	-------------------	-----------------	---------------------	------------------------	----------------------

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	c	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%	53 Kota/Kabupaten	44 Kota/Kabupaten	74,72%
---	---	---	-----	-------------------	-------------------	--------

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Daerah yang Terlibat Gerakan Sadar Halal

Gerakan Sadar Halal adalah suatu inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal, penerapan sistem Jaminan Produk Halal dan kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Gerakan ini diwujudkan melalui kegiatan edukatif, sosialisasi, promosi, dan kolaboratif. Daerah yang terlibat dalam Gerakan Sadar Halal adalah kabupaten/kota di Indonesia yang secara aktif dan nyata berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, atau memfasilitasi kegiatan Gerakan Sadar Halal di wilayahnya. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin luas jangkauan pelaksanaan gerakan sadar halal di tingkat daerah, sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 90% atau sebanyak 53 Kota/Kabupaten. Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal telah mencapai realisasi sebanyak 44 kota/kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 74,72%. Pelaksanaan indikator ini dilakukan pada program Literasi Sadar Halal pada 25 titik lokasi kota/kabupaten di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Riau, NTB, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal telah ditetapkan target sebesar 90% atau sebanyak 53 kota/kabupaten pada akhir tahun 2025. Realisasi yang telah dicapai pada triwulan III sebesar 44 kota/kabupaten dengan capaian sebesar 74,72%. Capaian triwulan III sebesar 74,72% tidak mencapai target yang telah ditentukan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 80%.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	0	45%	80%
	Capaian	0	42,45%	74,72%

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian sebesar 74,72% belum mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 80%, namun capaian triwulan III telah melebihi target dan capaian pada triwulan II.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III adalah pelaksanaan program Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat. Titik lokasi kota/kabupaten yang dilibatkan program Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a) 2 titik Kab. Tangerang;
- b) 3 titik Kota Jakarta Barat;
- c) 2 titik Kota Jakarta Selatan;
- d) 2 titik Kabupaten Rokan Hulu;
- e) 2 titik Dompu;
- f) 1 titik Kota Bima;
- g) 1 titik Kota Palembang;
- h) 1 titik Lombok Tengah;
- i) 1 titik Lombok Barat;
- j) 1 titik Lombok Utara;
- k) 1 titik Palu;
- l) 1 titik Poso; dan
- m) 1 titik Touna.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

- a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. kurang efektifnya koordinasi dengan *stakeholders* eksternal yang mengakibatkan jadwal dan lokasi yang tidak pasti; dan
- ii. terdapat perubahan anggaran pada beberapa titik lokasi.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. melakukan koordinasi dan fiksasi terkait penetapan jadwal dan lokasi dengan *stakeholder* terkait; dan
- ii. melakukan penyesuaian perencanaan anggaran program dalam mendukung capaian kinerja.

Dalam rangka mewujudkan sasaran program, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah menetapkan target pada setiap indikator kinerja dalam sasaran kegiatan dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Pencapaian indikator kinerja dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH	a	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	100 lembaga	95 lembaga	66,50%
	b	Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	55 kelompok masyarakat	17 kelompok masyarakat	39,45%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
	c Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	20 lembaga	13 lembaga	45,50%

a. Persentase Lembaga yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jumlah lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan efektivitas program pembinaan dalam meningkatkan literasi JPH dan kapasitas lembaga terkait. Semakin tinggi persentase pemahaman lembaga yang telah terbina menunjukkan bahwa semakin efektif dalam melaksanakan pembinaan JPH. Peningkatan pemahaman ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan lembaga JPH secara profesional, kredibel dan sesuai standar yang berlaku.

Capaian indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan diukur melalui jumlah lembaga JPH (Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH (LPP JPH) dibagi dengan jumlah lembaga JPH yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan. Target kinerja untuk indikator persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan pada tahun 2025 sebesar 70% atau sebanyak 100 lembaga. Pada Triwulan III, indikator ini telah direalisasikan sebesar 27 lembaga pada triwulan III yang ditambah dengan realisasi triwulan I sebesar 11 lembaga dan triwulan II sebesar 57 lembaga, sehingga menghasilkan realisasi total sebesar 95 lembaga dengan capaian sebesar 66,50% pada triwulan III. Capaian ini sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan III. Realisasi ini diperoleh dari antara lain sebagai berikut:

a) LP3H

Pada triwulan III sudah dilaksanakan:

- i. pembinaan dan monitoring kepada 8 Yayasan Paradigma Jember, Halal Center Al Falah, Yayasan Al Haromain, Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, Halal Center Uimsya Blok Agung Banyuwangi, Halal Center Universitas PGRI Banyuwangi, Yayasan Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan, Yayasan Pendidikan Islam Al Basalamah, Yayasan Pendidikan dan Sosial Darul Ashraf, PC NU Kabupaten Cianjur;
- ii. registrasi pada 19 LP3H baru yaitu: PCNU Kabupaten Cianjur, Institut Sains Dan Teknologi Nasional, Yayasan Pendidikan Islam Al-Basmalah, Yayasan Pendidikan Dan Sosial Darul Asyraf, Yayasan Al-Falah Tarutung, Jakarta Global University, Universitas Aisyah Pringsewu, Halal Center Universitas Pembangunan Nasional `Veteran` Jawa Timur, Icmi Orwil Bali, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Pcnu Bandar Lampung - Komunitas Halal Indonesia, Mathla`UI Anwar Sinar Gading - Edukasi Halal Indonesia, Yayasan Ibnu Khaldun Al Hasyimi, Al Baitul Izzah, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Halal Center Pondok Pesantren Alhamdulillah Geger Kedungadem Bojonegoro, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso, Yayasan Nurul Iman Tamansari Bukit Damai; dan
- iii. Registrasi P3H baru sebanyak 12.753 P3H setelah dilakukan pelatihan pendamping proses produk halal melalui pelatihan mandiri atau melalui *Learning Management System*.

b) LPH

Pada Triwulan III telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan terhadap 38 LPH Pratama yang hadir namun belum dapat dilakukan pengukuran terhadap LPH yang telah meningkat pemahamannya.

c) LPP JPH

Pada Triwulan II sudah dilaksanakan pembinaan kepada LPP JPH melalui Visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH ke 2 Lembaga yakni Universitas Airlangga dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim. Selain itu melakukan kegiatan Monitoring Lembaga JPH ke 1 Lembaga yakni LPP JPH Tekno Sains Academy ITS Surabaya.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 100 lembaga atau dengan persentase sebesar 70% pada akhir tahun 2025. Realisasi pada Triwulan I sebanyak 11 lembaga dengan penambahan pada triwulan II sebanyak 57 lembaga dan triwulan III sebesar 27 lembaga, sehingga total realisasi triwulan III sebanyak 95 lembaga. Capaian kinerja yang telah dilakukan perhitungan sebesar 66,50% pada triwulan III yang telah sesuai dengan target sebesar 66,50% pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan III.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	7,70%	47,60%	66,50%
	Capaian	7,70%	47,60%	66,50%

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian sebesar 66,50 % yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 66,50%. Capaian triwulan III lebih besar dari target dan capaian pada triwulan I dan triwulan II, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- rapat koordinasi pembinaan LPH pratama: Peningkatan Ruang Lingkup dan Kompetensi LPH;
- vistasi lembaga pelaksana pelatihan JPH; dan
- pembinaan LP3H, registrasi LP3H, dan registrasi P3H.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum tersusunnya program kerja untuk evaluasi peningkatan pemahaman bagi Lembaga JPH terbina; dan
- ii. perumusan kebijakan belum komprehensif sehingga berdampak pada pengukuran indikator kinerja yang belum terlaksana.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

- i. melakukan rapat pembahasan terkait program kerja yang akan dijalankan; dan
- ii. melakukan rapat koordinasi dengan internal pimpinan dan tim pembinaan terkait arah kebijakan yang selaras dengan indikator kinerja.

b. Persentase SDM Halal yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal (Juleha) dan penyelia halal. Jumlah SDM yang meningkatkan pemahamannya menggambarkan jumlah SDM yang memiliki peningkatan pemahaman tentang regulasi, sistem, dan prosedur Jaminan Produk Halal setelah mengikuti pembinaan. Peningkatan pemahaman diukur melalui instrumen penilaian kepada SDM Halal sebelum dan sesudah pembinaan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan.

Semakin tinggi persentase SDM Halal yang meningkatkan pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan keberhasilan kegiatan pembinaan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan bahwa SDM Halal semakin profesional dan siap menjalankan tugas penyelenggaraan JPH secara efektif. Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 55 kelompok dengan persentase sebesar 70%. Pada Triwulan III, indikator ini telah mencapai realisasi sebesar 3 kelompok masyarakat dengan penambahan dari triwulan II sebesar 14 kelompok masyarakat, sehingga total realisasi sebesar 17 kelompok

masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 39,45%. Capaian ini diperoleh dari kegiatan peningkatan mutu Auditor Halal pada 59 Auditor Halal LPH di 3 wilayah (Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan), Edukasi Halal Goes to Campus di UIN Maulana Malik Ibrahim dan Universitas Brawijaya, dan Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 55 kelompok atau dengan persentase sebesar 70% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan III sebesar 17 kelompok masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 39,45%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW II
Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	5%	17,82%	39,45%
	Capaian	0	17,82%	39,45%

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian sebesar 39,45% yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 39,45%. Capaian triwulan III telah melebihi target dan capaian pada triwulan I dan triwulan II, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) pelaksanaan program Literasi Sadar Halal;
- b) peningkatan mutu auditor halal; dan
- c) program edukasi Halal Goes to Campus.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. keterbatasan anggaran sehingga program tidak berjalan dengan masif dan lingkup terbatas; dan
- ii. program belum menjadi prioritas utama pembinaan Jaminan Produk Halal.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. menyusun anggaran berbasis output dan kinerja serta analisis kebutuhan; dan
- ii. upaya optimalisasi program prioritas bertujuan untuk menjangkau dan mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM Halal.

c. Persentase Pelaku Usaha yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

Jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mengikuti pembinaan. Semakin tinggi persentase pemahaman Pelaku usaha yang telah terbina menunjukkan bahwa Pelaku Usaha memahami kewajiban sertifikat halal dan dapat menjaga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Capaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan diukur dengan jumlah Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 20 lembaga dengan persentase sebesar 70%. Pada Triwulan III, terdapat realisasi sebesar 7 lembaga dengan ditambah dari triwulan I sebesar 6 lembaga, sehingga menghasilkan realisasi sebesar 13 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 45,50%. Capaian ini diperoleh dari Kegiatan Pembinaan Jaminan Produk Halal ke Pelaku usaha TP PKK Kabupaten Bogor (1 Lembaga), Pembinaan JPH ke Pelaku usaha binaan Dinas Pertanian dan perikanan Kabupaten Bogor (1 Lembaga), Pembinaan JPH pada Anggota APPBI DPD Sulawesi Selatan (1 Lembaga), Pembinaan JPH pada Anggota APPBI DPD Kalimantan Timur (1 Lembaga), Pembinaan JPH ke Anggota APPBI DPD di Bandung Jawa Barat (1 Lembaga) Pembinaan JPH ke Pelaku usaha Binaan BAZNAS Kota Mataram (1 Lembaga) dan Sosialisasi sertifikasi Halal ke Pertuni (1 Lembaga).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 20 lembaga atau dengan persentase 70% pada akhir tahun 2025. Realisasi pada triwulan III sebesar 7 lembaga dengan ditambah dari triwulan I sebesar 6 lembaga, sehingga menghasilkan realisasi sebesar 13 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 45,50%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	Target	21%	21%	45,50%
	Capaian	21%	0	45,50%

Pada Triwulan III tahun 2025, terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan triwulan I dan triwulan II. Capaian tersebut meningkat hingga 24,5% dari triwulan I dan triwulan II.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) pembinaan JPH Pelaku usaha TP PKK Kabupaten Bogor;
- b) pembinaan JPH Ke Pelaku usaha Binaan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bogor;
- c) pembinaan JPH pada Anggota APPBI DPD Sulawesi selatan;
- d) pembinaan JPH pada Anggota APPBI DPD Kalimantan Timur;

- e) pembinaan JPH ke Anggota APPBI DPD di Bandung Jawa Barat;
- f) pembinaan JPH ke Pelaku usaha Binaan BAZNAS Kota Mataram; dan
- g) sosialisasi sertifikasi Halal ke Pertuni.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. sulit dalam memperoleh kurasi data Pelaku usaha pada Asosiasi maupun Dinas dan lembaga karena belum sepenuhnya terintegrasi dengan OSS BKPM karena penggunaan Aplikasi personal masing-masing daerah;
- ii. asumsi biaya yang mahal dari Pelaku usaha saat melakukan Pengajuan Sertifikasi Halal; dan
- iii. perubahan proyeksi anggaran akibat adanya efisiensi.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. meningkatkan sinergitas dengan Dinas Daerah, Pemda dan Asosiasi Pelaku Usaha dalam memperoleh data terkait binaan Pelaku usaha sesuai dengan masing-masing aplikasi pengembang;
- ii. memberikan sosialisasi sekaligus edukasi sesuai dengan regulasi; dan
- iii. menyusun rencana proyeksi anggaran dengan lebih efektif.

2. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	120 lembaga	87 lembaga	72,50%
	b	Persentase laporan dan temuan hasil	100%	600 lembaga	532 lembaga	88,67%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
	pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi				
c	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%	4 laboratorium	3 laboratorium	13%
d	Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%	800 SDM Halal	711 SDM Halal	71,10%
e	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%	678 pengawas	688 pengawas	76,11%

a. Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Lembaga yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Lembaga yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

Laporan dan temuan hasil pengawasan adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap lembaga berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi yang ditindaklanjuti menggambarkan

persentase dari laporan hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah di terbitkan rekomendasi diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah laporan hasil pengawasan lembaga

B: Jumlah target pengawasan lembaga pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 120 lembaga dengan persentase sebesar 100%. Pada Triwulan III, realisasi tercapai sebesar 87 lembaga yang telah diawasi, dianalisis, dan diterbitkan rekomendasi dengan capaian kinerja sebesar 72,50% yang telah melebihi target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal triwulan III Tahun 2025. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan tindak lanjut aduan dan temu wicara terhadap:

- a) kegiatan temu wicara 2 kelompok masyarakat pada 2 titik lokasi (Bojonegoro titik lokasi 1, Bojonegoro titik lokasi 2) pada Bulan Juli;
- b) kegiatan temu wicara 10 kelompok masyarakat pada 10 titik lokasi (Bondowoso, Probolinggo titik lokasi 1, Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo titik lokasi 2, Probolinggo titik lokasi 3, Blitar, Kediri, Bojonegoro titik lokasi 1, Bojonegoro titik lokasi 2) pada Bulan Agustus;
- c) kegiatan temu wicara 3 kelompok masyarakat pada 3 titik lokasi (Pamekasan titik lokasi 1, Pamekasan titik lokasi 2, pamekasan titik lokasi 3) pada bulan Bulan September; dan
- d) kegiatan pengawasan LPH 6 lembaga (LPH YPM Salman ITB, LPH Halal Madani Sumatera Barat, LPH UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, LPH BSPJI Ambon Maluku, LPH UNAIR SBY, LPH BSPJI Banjarbaru Kalsel).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi telah ditetapkan target sebesar 120 lembaga atau dengan persentase sebesar 100% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan III tercapai realisasi sebesar 87 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 72,50%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	Target	24,17%	55,83%	70,83%
	Capaian	24,17%	55,83%	72,50%

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian sebesar 72,50% yang telah melebihi target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 70,83%. Capaian triwulan III telah melebihi target dan capaian pada triwulan I dan triwulan II, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) kegiatan temu wicara 2 kelompok masyarakat pada 2 titik lokasi (Bojonegoro titik lokasi 1, Bojonegoro titik lokasi 2) pada Bulan Juli;
- b) kegiatan temu wicara 10 kelompok masyarakat pada 10 titik lokasi (Bondowoso, Probolinggo titik lokasi 1, Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo titik lokasi 2,

Probolinggo titik lokasi 3, Blitar, Kediri, Bojonegoro titik lokasi 1, Bojonegoro titik lokasi 2) pada Bulan Agustus;

c) kegiatan temu wicara 3 kelompok masyarakat pada 3 titik lokasi (Pamekasan titik lokasi 1, Pamekasan titik lokasi 2, pamekasan titik lokasi 3) pada bulan Bulan September; dan

d) kegiatan pengawasan LPH 6 lembaga (LPH YPM Salman ITB, LPH Halal Madani Sumatera Barat, LPH UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, LPH BSPJI Ambon Maluku, LPH UNAIR SBY, LPH BSPJI Banjarbaru Kalsel).

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum terekamnya kinerja LPH pada aplikasi SIHalal yang membuat pengawas JPH tidak memiliki data dasar untuk melakukan pengawasan *on desk* sebelum turun ke lapangan; dan
- ii. belum terdokumentasinya data dan dokumen lengkap terkait pendirian LPH pada aplikasi SIHalal.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. berkoordinasi dengan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dan Pusat Data dan Informasi untuk melakukan sinkronisasi data terkait pendirian LPH pada aplikasi SIHalal; dan
- ii. melaksanakan sosialisasi kepada pimpinan LPH untuk dapat membuat laporan kinerja LPH dan menguploadnya ke dalam SIHalal.

b. Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Pelaku Usaha dan produk yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Pelaku Usaha dan produk yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Produk berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang

dianalisis dan diterbitkan rekomendasi yang ditindaklanjuti menggambarkan persentase dari laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk

B: Jumlah target pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 600 lembaga dengan persentase sebesar 100%. Pada Triwulan III, realisasi tercapai sebesar 532 pelaku usaha dengan capaian kinerja sebesar 88,67% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan pengawasan terhadap 532 pelaku usaha dan 1268 produk yang telah diawasi, dianalisis, dan diterbitkan rekomendasi.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi telah ditetapkan target sebesar 600 lembaga atau dengan persentase sebesar 100% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan III tercapai realisasi sebesar 532 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 88,67%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	Target	24,17%	84,67%	88,67%
	Capaian	19,83%	84,67%	88,67%

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian sebesar 88,67% yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 88,67%. Capaian triwulan III telah melebihi target dan capaian pada triwulan I dan triwulan II, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) melakukan pengawasan terhadap 532 pelaku usaha; dan
- b) melakukan pengawasan terhadap 1268 produk.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 adalah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh pengawas belum didukung oleh fasilitas pelaporan tindak lanjut yang memadai, sehingga progres perbaikan oleh pelaku usaha tidak dapat terpantau secara optimal.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut adalah membangun fitur khusus pada sistem informasi JPH yang memungkinkan pelaku usaha mengunggah bukti perbaikan (foto, dokumen, atau video) secara mandiri sebagai respon terhadap rekomendasi pengawas.

c. Persentase Laboratorium Penyelenggara JPH yang Memenuhi Standar

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laboratorium Penyelenggara JPH yang Memenuhi Standar

Jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan

integritas dalam melakukan pengujian produk halal. Semakin tinggi persentase laboratorium yang memenuhi standar, menunjukkan bahwa fasilitas laboratorium penyelenggara JPH beroperasi dengan kualitas dan standar yang sesuai. Capaian persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar menggambarkan jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan pengujian produk halal. Pengukuran indikator kinerja tersebut diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah laboratorium penyelenggara JPH yang telah dilakukan pembinaan

B: Jumlah target laboratorium yang dimiliki LPH pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 4 laboratorium dengan persentase sebesar 17%. Pada Triwulan III, terdapat 3 laboratorium dari 4 laboratorium yang memenuhi standar dengan capaian kinerja sebesar 13%.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar telah ditetapkan target sebesar 4 laboratorium atau dengan persentase sebesar 17% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan III telah tercapai realisasi sebesar 3 laboratorium yang memenuhi standar dengan capaian sebesar 13%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	Target	5%	10%	13%
	Capaian	0	0	13%

Pada Triwulan III tahun 2025, terdapat capain sebesar 13% yang sesuai dengan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 13%. Capaian

triwulan III telah melebihi target dan capaian pada triwulan I dan triwulan II, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) sosialisasi Regulasi Keputusan Kepala BPJPH Nomor 135 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kehalalan pada Lab BBSPJIA Bogor, PT Sucofindo (Persero) SBU Laboratory dan Equitrust Laboratory;
- b) penerbitan 4 Sertifikat Hasil Uji (SHU) kegiatan Pengujian Alkohol dengan Metode SNI 8965:2021 dan metode inhouse analisis kadar alkohol berbasis teknik headspace dengan Jenis Sampel Yoghurt, sari buah, dan kombucha;
- c) penerbitan 6 Sertifikat Hasil Uji (SHU) kegiatan Pengujian Protein dengan metode inhouse analisis peptida menggunakan LC-HRMS dengan Jenis Sampel Gelatin, pelumas, dan marshmallow;
- d) pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) FGD Penyusunan Pedoman Sampling dan Pengujian pada tanggal 23–25 Juli 2025 berjumlah ±40 orang peserta dengan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan BPOM dan Kesmavet sebagai narasumber;
- e) kegiatan Uji Profisiensi Lab SNSU BSN Tahun 2025 pada 15 Agustus 2025 dengan Ruang Lingkup Pengujian DNA dan Skema Uji Bakso, daging, dan kapsul;
- f) kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Analisis Alkohol GC-FID Metode Headspace pada 14–18 Juli 2025 dengan 10 orang peserta;
- g) kegiatan In House Training SNI ISO/IEC 17025:2017 pada 26–27 Agustus 2025 dengan 20 orang peserta;
- h) kegiatan RDK Pengujian Kehalalan Berbasis Lipid pada 15 September 2025 dengan 20 orang peserta;

- i) penyusunan Draft Pedoman Sampling dan Pengujian pada tanggal 23–25 Juli 2025. Draft pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pengawas dan analis laboratorium halal, dengan melibatkan unsur BPJPH, BPOM, dan Kesmavet;
- j) penetapan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kehalalan melalui Kepkaban Nomor 135 Tahun 2025;
- k) penyusunan 4 Draft Metode Pengujian meliputi: 1) Prosedur validasi metode pengujian peptida menggunakan LC-HRMS; 2) Instruksi kerja analisis alkohol metode headspace dengan GC-FID; 3) Prosedur validasi metode headspace untuk analisis kadar alkohol; dan 4) Instruksi kerja pengujian DNA babi menggunakan RT-PCR metode SNI 9278:2024; dan
- l) pemeliharaan alat melalui Kalibrasi terhadap 1 (satu) unit instrumen besar untuk analisis DNA (RT-PCR).

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. belum tersedianya data laboratorium yang dimiliki LPH yang merepresentasikan jumlah dan kondisi lab dikarenakan data terkait lab belum terintegrasi dalam aplikasi Sihalal; dan
- ii. program pembinaan terhadap laboratorium belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sehingga anggaran yang tersedia masih sangat terbatas.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. melakukan koordinasi dengan Direktorat Standardisasi terkait permintaan data Laboratorium LPH yang telah terakreditasi meminta; dan
- ii. merevisi anggaran berbasis output dan sesuai analisis kebutuhan.

d. Persentase SDM Halal yang Mematuhi Regulasi Penyelenggaraan JPH

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Memenuhi Regulasi Penyelenggaraan JPH

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, pendamping (P3H) dan penyelia halal. Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi mencerminkan kedisiplinan dan integritas

pelaksanaan regulasi pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Semakin tinggi persentase SDM yang mematuhi regulasi, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan JPH semakin baik. Capaian indikator SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH dihitung menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah SDM Halal yang mematuhi regulasi

B: Jumlah target SDM Halal yang terawasi pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 800 SDM Halal dengan persentase sebesar 80%. Pada Triwulan III, realisasi tercapai sebesar 711 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 71,10% yang belum sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan pengawasan terhadap 711 pendamping proses produk halal (P3H) dan pengawasan terhadap 55 LP3H.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH telah ditetapkan target sebesar 800 SDM atau dengan persentase sebesar 80% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan III tercapai realisasi sebesar 711 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 71,10%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	Target	14,48%	65,25%	75%
	Capaian	11,90%	52,20%	71,10%.

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian sebesar 71,10% belum mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 75%. Capaian triwulan III telah melampaui target dan capaian pada triwulan I dan triwulan II, sehingga

terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) melakukan Pengawasan terhadap 55 LP3H; dan
- b) melakukan Pengawasan terhadap 711 Pendamping Proses Produk Halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. minimnya pengetahuan dalam mengimplementasikan SJPH;
- ii. variatifnya kesiapan LPH dan LP3H dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi halal; dan
- iii. kurangnya juru sembelih halal dan tenaga kesehatan yang bertugas memastikan pemenuhan standar halal di unit tersebut.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. pelaksanaan pembinaan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengetahuan SDM dalam mengimplementasikan SJPH;
- ii. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan serta sosialisasi regulasi terkait untuk Auditor Halal dan P3H;
- iii. pelatihan juru sembelih halal guna memastikan pemenuhan standar halal di unit terkait.

e. Persentase Pengawas JPH yang Mendapat Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengawas JPH yang Mendapat Pembinaan

Pengawas JPH merupakan ASN Jabatan Fungsional (JF) JPH yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem Jaminan Produk Halal, baik

usaha, lembaga penyelenggara, maupun produk halal, sesuai standar prosedur dan regulasi teknis yang berlaku. Semakin tinggi persentase pengawas yang memperoleh pembinaan, maka menunjukkan bahwa pembinaan pengawas JPH berjalan secara sistematis dan konsisten untuk menjaga kualitas pengawasan JPH. Capaian indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapatkan pembinaan dihitung menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan:

A: Jumlah JF Pengawas JPH yang mendapat pembinaan

B: Jumlah JF Pengawas JPH pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 678 Pengawas JPH dengan persentase sebesar 75%. Pada triwulan III, telah tercapai realisasi sebesar 688 Pengawas JPH dengan capaian sebesar 76,11%. Capaian ini telah melampaui target persentase yang ditetapkan sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan indikator ini melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a) penerbitan 4 dokumen resmi terkait: 1) rancangan Peraturan BPJPH tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH; 2) informasi Faktor Jabatan Fungsional Pengawas JPH; 3) Surat Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas JPH; dan 4) Penyepakatan dan Penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Penjaminan Mutu Pelatihan.
- b) penerbitan 2 surat resmi terkait: 1) pelaksanaan Sosialisasi Penetapan Kelas Jabatan Kepada Instansi Pengguna; dan 2) penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas JPH.
- c) penetapan 2 regulasi antara lain sebagai berikut: 1) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 169 Tahun 2025 tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Calon Pengawas JPH; dan 2) Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH.
- d) pelaksanaan 3 kegiatan yang dengan rincian: 1) Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF Pengawas JPH; 2) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan BPJPH tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH; dan 3) Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan telah ditetapkan target sebesar 678 Pengawas JPH atau dengan persentase sebesar 75% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan III melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2025 yaitu sebesar 688 Pengawas JPH dengan capaian sebesar 76,11%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III
Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	Target	10%	30%	73,67%
	Capaian	0	76,11%	76,11%

Pada Triwulan III tahun 2025, capaian sebesar 76,11% telah melampaui target triwulan III dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 30%. Capaian triwulan III telah melampaui target dan capaian pada triwulan I dan triwulan II, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III antara lain sebagai berikut:

- a) penerbitan 4 dokumen resmi terkait: 1) rancangan Peraturan BPJPH tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH; 2) informasi Faktor Jabatan Fungsional Pengawas JPH; 3) Surat Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas JPH; dan 4) Penyepakatan dan Penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Penjaminan Mutu Pelatihan.

- b) penerbitan 2 surat resmi terkait: 1) pelaksanaan Sosialisasi Penetapan Kelas Jabatan Kepada Instansi Pengguna; dan 2) penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas JPH.
 - c) penetapan 2 regulasi antara lain sebagai berikut: 1) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 169 Tahun 2025 tentang Kurikulum dan Silabus Pelatihan Calon Pengawas JPH; dan 2) Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH.
 - d) pelaksanaan 3 kegiatan yang dengan rincian: 1) Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF Pengawas JPH; 2) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan BPJPH tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH; dan 3) Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH.
- 6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi
- a) Kendala

Pada triwulan III, tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja karena mayoritas kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan II melalui zoom meeting yang dihadiri 688 peserta.
 - b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi tidak ditetapkan karena tidak terdapat kendala yang dihadapi pada triwulan III.

B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah dikurangi blokir adalah sebesar Rp20.015.965.000,- (dua puluh miliar lima belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III (September 2025) tercatat sebesar Rp13.360.463.831,- (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), atau sebesar 66,75% dari total pagu anggaran. Dengan demikian, sisa anggaran yang masih tersedia adalah sebesar Rp6.655.501.169,-.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program: Kegiatan: Output: SubOutput:

Periode September 2025

Kementerian : 142 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Unit Organisasi : 01 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Satuan Kerja : 693733 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	20.015.965.000	0	9.488.790.358	3.871.673.473	13.360.463.831	66,75 %	6.655.501.169
DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	20.015.965.000	0	9.488.790.358	3.871.673.473	13.360.463.831	66,75 %	6.655.501.169
DC.7161 Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	20.015.965.000	0	9.488.790.358	3.871.673.473	13.360.463.831	66,75 %	6.655.501.169
QDC Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	9.633.186.000	0	3.542.530.913	2.896.295.307	6.438.816.220	66,84 %	3.194.369.780
QDC.001 Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	9.633.186.000	0	3.542.530.913	2.896.295.307	6.438.816.220	66,84 %	3.194.369.780
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	2.910.385.000	0	1.382.920.200	517.762.140	1.900.682.340	65,31 %	1.009.702.660
QDC.001 SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal	2.910.385.000	0	1.382.920.200	517.762.140	1.900.682.340	65,31 %	1.009.702.660
QDC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7.472.394.000	0	4.963.339.245	457.626.026	5.020.965.271	67,19 %	2.451.428.729
QDC.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	3.483.945.000	0	2.038.284.885	94.488.225	2.132.773.110	61,22 %	1.351.171.890
QDC.002 SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH	3.988.449.000	0	2.925.054.360	363.137.801	2.888.192.161	72,41 %	1.100.256.839

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah mencapai 66,75%, menunjukkan progres pelaksanaan kegiatan yang cukup baik hingga akhir Triwulan III. Pada kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga telah terealisasi sebesar Rp6.438.816.220,- atau 66,84%, sementara kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat mencapai realisasi sebesar Rp1.900.682.340,- atau 65,31%. Selanjutnya, kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lembaga mencatat realisasi sebesar Rp5.020.965.271,- atau 67,19%. Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berada pada jalur yang sesuai dengan rencana, serta diharapkan dapat dioptimalkan pada Triwulan IV guna mencapai target realisasi anggaran secara maksimal hingga akhir tahun.

C. HIGHLIGHT KINERJA

Highlight Kinerja memuat capaian kinerja lain yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan Kinerja. Terdapat beberapa program di Direktorat Bina JPH dalam mendukung tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang dapat menggambarkan efektivitas program, diantaranya:

1. Penguatan Ekosistem Halal di Indonesia Melalui Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina Jaminan Produk Halal maka diselenggarakan kegiatan Penguatan Ekosistem Halal di Indonesia melalui Pendirian LPH, LP3H, dan LPK JPH. Sasaran pada kegiatan ini adalah perguruan tinggi, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan stakeholders terkait terutama pada provinsi yang belum memiliki Lembaga JPH. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya Lembaga JPH dalam rangka akselerasi sertifikasi halal di Indonesia melalui

pembinaan kepada lembaga tersebut. Kegiatan dilakukan dengan memberikan sosialisasi dalam memperkuat peran serta lembaga terhadap penyelenggaraan JPH.

Metode yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah rapat pertemuan berupa sosialisasi dan bimbingan terkait penyelenggaraan JPH di beberapa provinsi yang belum memiliki Lembaga JPH dan evaluasi pada calon Lembaga JPH diantaranya Provinsi Papua, Kalimantan Utara, Bali, dan Gorontalo. Kegiatan dilakukan melalui pertemuan BPJPH dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan stakeholders terkait.

2. Penguatan Ekosistem Halal di Indonesia Melalui Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Penguatan peran serta dan monitoring Lembaga terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan dalam rangka menjalankan pembinaan jaminan produk halal pada Lembaga JPH. Pembinaan terhadap Lembaga JPH menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem tersebut. Pembinaan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam JPH menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Metode yang digunakan pada kegiatan monitoring tersebut adalah monitoring lapangan pada lembaga Jaminan Produk Halal di beberapa provinsi. Pemilihan lokasi didasarkan pada lembaga Jaminan Produk Halal yang sudah teregistrasi maupun bekerja sama dengan BPJPH dan belum dilakukan monitoring sebelumnya. Lembaga JPH yang dilakukan monitoring sejumlah 1 (satu) Lembaga JPH yakni Tekno Sains Academy ITS Surabaya.

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) sasaran program. Sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti merupakan satu-satunya indikator yang memperoleh capaian kinerja 100% atau masuk ke dalam kategori SANGAT BAIK, namun untuk indikator lainnya masih berada di bawah target yang ditentukan. Sasaran program meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya belum memiliki realisasi, sehingga capaian kinerjanya belum dapat dihitung. Indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten tidak memiliki realisasi pada periode ini, sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dihitung. Indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal masih berada di bawah target triwulan III yaitu sebesar 65%.

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH dengan 3 (tiga) indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

1. indikator kinerja berupa persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 66,50%;
2. indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 39,45%; dan
3. indikator kinerja berupa persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 45,50%.

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal dengan 5 (lima) indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

1. indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 72,50%;
2. indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 88,67%;
3. indikator kinerja berupa persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar sudah terdapat realisasi sehingga capaian kinerjanya sebesar 13%;

4. indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH memperoleh capaian kinerja sebesar 71,10%; dan
5. indikator kinerja berupa persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 76,11%.

Beberapa indikator kinerja belum memiliki realisasi karena Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan unit kerja baru di bawah BPJPH sebagai LPNK yang masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan.